

INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG



EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan I ini berisikan rencana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dan dokumen ini akan menjadi salah satu pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Provinsi Lampung dalam menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan Tahun 2024.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I ini, untuk itu kami sangat menghargai setiap masukan-masukan positif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 17 Mei 2024

INSPEKTUR,



Ir. FREDY SM.MM. CGCAE

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP 19650202 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II	PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	5
	2.1 Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat daerah sampai padaProgram, Kegiatan dan Sub Kegiatan	5
	2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Antara Renja dan Renstra	7
	2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Renstra	10
	2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA)	20
BAB III	CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	24
	3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Renja Perangkat Daerah TriwulanI Tahun 2024	24
	3.2 Capaian Kinerja IKU (Sasaran Renstra) Triwulan I Tahun 2024	28
BAB IV	PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	29
	4.1 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Hambatan	29
	4.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja	29
	4.3 Rekomendasi Kebijakan	
BAB V	PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Tujuan, sasaran dan Indikator sasaran serta Target Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024	5
Tabel 2.2	Tabel Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Renstra 2019-2024	7
Tabel 2.3	Tabel Program Dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024	14
Tabel 2.4	Tabel Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renja Perangkat Daerah Dengan APBD Tahun 2024	16
Tabel 3.1	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Program kepada Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024	19
Tabel 3.2	Tabel Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evaluasi hasil Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan Inspektorat Provinsi Lampung yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi hasil Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Pasal 259 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Inspektorat Provinsi Lampung melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappeda ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Inspektorat Provinsi Lampung akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Lebih lanjut, hasil Inspektorat Provinsi Lampung menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung untuk tahun berikutnya.

Adapun Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Inspektotrat Provinsi Lampung dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah disusun, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Inspektorat Provinsi Lampung ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2024;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Inspektur Provinsi Lampung Nomor 700/166/IV.01/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi Lampung dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk:

1. Mengukur nilai keberhasilan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan indikator susunan kinerja yang telah ditetapkan tahun 2024;
2. Melakukan evaluasi terhadap capaian rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian rencana strategis (Renstra);
3. Merumuskan program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung.

BAB II

PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Sasaran yang ingin di capai pada evaluasi Renja ini adalah sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung yang tertuang dalam Renja Tahun 2024 dan merupakan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode tahun 2019 – 2024 adalah :

Tabel 2.1
Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran serta target Kinerja
Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2024

**CASCADING KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019-2024**

RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
9	15	16	25	35	45
Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
					Reviu Laporan Kinerja
					Reviu Laporan Keuangan
					Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota
					Kerjasama Pengawasan Internal
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
				PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, & EVALUASI KINERJA PERANGKAT	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
					Penatausahaan Barang Milik Daerah
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyediaan Bahan/ Material
					Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
				PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dan Renstra

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Renja 2024 dengan Renstra 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra 2019-2024

Tabel Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja dengan Renstra							
NO		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	RENJA 2024		RENSTRA 2019-2024	
				KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
I		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86%	6.772.888.000	100%	8.134.725.000
1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelesaian hasil temuan yang selesai ditindaklanjuti	86%	6.052.460.000	100%	7.272.225.000
	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	1.200.000.000	5 Laporan	1.814.183.000
	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	754.000.000	5 Laporan	819.900.000
	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	249.500.000	3 Laporan	46.432.000
	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	444.050.000	3 Laporan	16.800.000
	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45 Laporan	1.729.270.000	45 Laporan	2.124.910.000
	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Dibentuk	1 Kesepakatan	1.100.000.000	1 Kesepakatan	2.000.000.000
	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	575.640.000	2 Dokumen	450.000.000

2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	720.428.000	100%	861.860.000
	8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	45.000.000	3 Laporan	225.000.000
	9	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	675.428.000	16 Laporan	636.860.000
II		Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Indeks SPIP Perangkat Daerah	100%	967.945.000	100%	966.522.000
1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase penyusunan dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan	100%	200.000.000	100%	162.000.000
	10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	100.000.000	1 Rekomendasi	87.845.000
	11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	100.000.000	1 Rekomendasi	74.155.000
		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah	86%	767.945.000	100%	804.522.000
	12	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 OPD	287.800.000	48 OPD	300.022.000
	13	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 OPD	112.249.000	15 OPD	213.497.000
	14	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	161.983.000	4 Kegiatan	50.429.000
	15	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 OPD	205.913.000	48 OPD	240.574.000
III		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	54.797.958.049	100%	32.398.603.000

5		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100.000.000	100%	14.400.000
	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	14.400.000
6		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	49.549.498.849	100%	29.762.700.000
	17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang	49.529.498.849	162 Orang	29.752.700.000
	18	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	10.000.000
7		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah	100%	25.000.000	100%	75.000.000
	19	Penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	40.000.000
	20	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	35.000.000
8		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Kompetensi Pegawai yang ditingkatkan	100%	1.184.129.000	66%	650.000.000
	19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	1.184.129.000	76 Orang	650.000.000
8		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.339.731.200	100%	907.684.000
	20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.208.200	12 Paket	28.850.000
	21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.100.000.000	1 Paket	74.800.000
	22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.000.000	12 Paket	45.000.000

	23	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	61.000.000	12 Paket	61.000.000
	24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	173.000.000	12 Paket	170.000.000
	25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	921.523.000	12 Paket	513.924.000
9		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	899.599.000	100%	565.439.000
	26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Paket	345.120.000	12 Paket	378.120.000
	27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Paket	554.479.000	12 Paket	187.319.000
10		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	700.000.000	100%	498.380.000
	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	336.350.000	14 unit	277.600.000
	29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 unit	150.000.000	82 unit	76.100.000
	30	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	213.650.000	4 unit	144.680.000

2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Renstra

Pada Tahun Anggaran 2024, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung dan terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 33 program, 11 Kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan. Rincian Program,

Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

Sub Kegiatan :

2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dan

5) Penatausahaan Barang Milik Daerah

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

10) Penyediaan Bahan/Material;

11) Fasilitasi Kunjungan Tamu;

12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- 14) *Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor.*
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- 15) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan;*
- 16) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
- 17) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Sub Kegiatan :
- 18) *Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;*
- 19) *Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;*
- 20) *Reviu Laporan Kinerja;*
- 21) *Reviu Laporan Keuangan;*
- 22) *Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota;*
- 23) *Kerjasama Pengawasan Internal;*
- 24) *Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.*
9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- Sub Kegiatan :
- 25) *Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;*
- 26) *Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.*

C. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
- Sub Kegiatan :
- 27) *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;*
- 28) *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.*
11. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
- Sub Kegiatan :

- 29) *Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;*
- 30) *Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;*
- 31) *Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;*
- 32) *Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.*

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun
2024

NO		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	DPA 2024	
				KINERJA	Rp.
I		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuandan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86 %	6.772.888.000
1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelesaian hasil temuanyang selesai ditindaklanjuti	86 %	6.052.460.000
	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	1.200.000.000
	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerinntah Daerah	6 Laporan	754.000.000
	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	249.500.000
	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	444.050.000
	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umumdan Teknis Kabupaten/Kota	45 Laporan	1.729.270.000

	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Dibentuk	1 Kesepakatan	1.100.000.000
	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	575.640.000
2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	720.428.000
	8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	45.000.000
	9	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	675.428.000
II		Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Indeks SPIP Perangkat Daerah	100 %	967.945.000
3		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase penyusunan dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan	100 %	200.000.000
	10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	100.000.000
	11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasailitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	100.000.000

4		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah	100 %	767.945.000
	12	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 OPD	287.800.000
	13	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 OPD	112.249.000
	14	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	161.983.000
	15	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 OPD	205.913.000
III		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	54.797.958.049,48
5		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100.000.000
	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	100.000.000

6		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	49.549.498.849,48
	17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164 Orang	49.529.498.849,48
	18	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan	20.000.000
7		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	25.000.000
	19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000
	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000
8		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Kompetensi Pegawai yang ditingkatkan	100 %	1.184.129.000
	21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 Orang	1.184.129.000
9		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.339.731.200

	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.208.200
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.100.000.000
	24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.000.000
	25	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	61.000.000
	26	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	173.000.000
	27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	921.523.000
10		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	899.599.000
	28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	345.120.000
	29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	554.479.000

11s		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	700.000.000
	30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	336.350.000
	31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 unit	150.000.000
	32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	213.650.000
		TOTAL			62.538.791.049

2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Renja 2024 dengan Renstra 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Renstra 2019-2024

Tabel Kesesuaian Program dan Kegiatan Renstra dengan DPA SKPD

NO		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKzATOR	DPA 2024		RENSTRA 2019-2024	
				KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
I		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase PenyelesaianHasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	86%	6.772.888.000	86%	8.134.725.000
1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelesaian hasil temuan yang selesai ditindaklanjuti	86%	6.052.460.000	86%	7.272.225.000
	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	1.200.000.000	6 Laporan	1.814.183.000
	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	754.000.000	5 Laporan	819.900.000
	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	249.500.000	3 Laporan	46.432.000
	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	444.050.000	3 Laporan	16.800.000
	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45 Laporan	1.729.270.000	45 Laporan	2.124.910.000
	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Dibentuk	1 Kesepakat an	1.100.000.000	1 Kesepakat an	2.000.000.000
	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	634.640.000	2 Dokumen	450.000.000
2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	575.640.000	100%	861.860.000
	8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	45.000.000	3 Laporan	225.000.000
	9	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16 Laporan	675.428.000	16 Laporan	636.860.000
II		Program Perumusaan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Indeks SPIP Perangkat Daerah	100%	967.945.000	100%	966.5222.000
1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase penyusunan dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan	100%	200.000.000	100%	162.000.000
	10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomend asi	100.000.000	1 Rekomend asi	87.845.000
	11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasailitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomend asi	100.000.000	1 Rekomend asi	74.155.000

		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah	100%	767.945.000	100%	804.522.000
	12	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 OPD	287.800.000	48 OPD	300.022.000
	13	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 OPD	112.249.000	15 OPD	213.497.000
	14	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	161.983.000	4 Kegiatan	50.429.000
	15	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 OPD	205.913.000	48 OPD	240.574.000
III		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	37.075.727.469	100%	32.398.603.000
5		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	90.000.000	100%	14.400.000
	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	90.000.000	6 Dokumen	14.400.000
6		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	37.882.066.459	100%	29.762.700.000
	17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164 Orang	37.862.066.459	162 Orang	29.752.700.000
	18	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	10.000.000
7		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	25.000.000	100%	25.000.000
	Ghjk=	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000
	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
8		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Kompetensi Pegawai yang ditingkatkan	100%	864.239.000	100%	650.000.000

	21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 Orang	864.239.000	76 Orang	650.000.000
8		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.788.850.000	100%	907.684.000
	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.208.200	12 Paket	28.850.000
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	755.347..800	1 Paket	74.800.000
	24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.000.000	12 Paket	45.000.000
	25	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	61.000.000	12 Paket	61.000.000
	26	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	104.000.000	12 Laporan	170.000.000
	27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	769.984.000	12 Laporan	513.924.000
9		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	836.599.000	100%	565.439.000
	28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	345.120.000	12 Laporan	378.120.000
	29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	491.479.000	12 Laporan	187.319.000
10		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	668.030.000	100%	498.380.000
	30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	304.600.000	14 unit	277.600.000
	31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 unit	96.100.000	82 unit	76.100.000
	32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	267.330.000	4 unit	144.680.000

BAB III
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024

Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan pada dokumen Renja Inspektorat Provinsi Lampung 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024

NO	KODE				KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan I Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
	(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)	(20)	(21)
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN																					
	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	133.987.983.208	96,05	62.643.713.056	100	54.797.958.049	13,48 %	6.705.078.126	13,94%	12,24%	13,94%	69.348.791.182	75,25%	52%		Inspektorat			
	6	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	104.400.000	100	51.703.900	100	100.000.000	0,00 %	0	0,00%	0,00%	0,00%	51.703.900	50,00%	49,52%		Inspektorat			
	6	01	01	1.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	24	104.000.000	12	51.703.900	5	100.000.000	0	0	0,00%	0,00%	12	51.703.900	50,00%	49,72%	dalam proses realisasi	Inspektorat		
	6	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara	100	119.717.775.208	100	56.779.248.595	100	49.549.498.849	12,65 %	5.260.544.758	12,65%	10,62%	12,65%	62.039.793.353	53,20%	51,82%		Inspektorat			
	6	01	01	1.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya orang yang menerima gaji dan tunjangan	Dokumen	640	119.647.775.208	320	56.760.236.595	162	49.529.498.849	41	5.260.544.758	25,31%	10,62%	361	62.020.781.353	56,41%	51,84%		Inspektorat		
	6	01	01	1.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		16	70.000.000	8	19.012.000	4	20.000.000	0	0	0,00%	0,00%	8	19.012.000	50,00%	27,16%	dalam proses realisasi	Inspektorat		
	6	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah	%	100	130.000.000	100	7.066.000	100	25.000.000	0,00 %	0	0,00%	0,00%	0,00%	7.066.000	25,00%	5,44%		Inspektorat			
	6	01	01	1.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	65.000.000	1	3.316.000	1	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%	1	3.316.000	25,00%	5,10%	dalam proses realisasi	Inspektorat		
	6	01	01	1.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	65.000.000	1	3.750.000	1	10.000.000	0	0	0,00%	0,00%	1	3.750.000	25,00%	5,77%	dalam proses realisasi	Inspektorat		
	6	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kompetensi Pegawai Perangkat Daerah		0,68	3.090.435.000	0,72	491.351.678	100	1.184.129.000	27,14 %	1.100.000.000	27,14%	92,90%	27,14%	1.591.351.678	57,69%	51,49%		Inspektorat			
	6	01	01	1.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		312	3.090.435.000	142	491.351.678	140	11.841.290.000	38	1.100.000.000	27,14%	9,29%	180	1.591.351.678	57,69%	51,49%		Inspektorat		
	6	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	5.395.097.000	100	2.735.654.484	100	2.339.731.200	16,67 %	79.671.069	16,67%	3,41%	16,67%	2.815.325.553	200,00%	52,18%		Inspektorat			
	6	01	01	1.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		48	166.474.600	24	65.604.900	12	39.208.200	3	7.817.000	25,00%	19,94%	27	73.421.900	56,25%	44,10%		Inspektorat		
	6	01	01	1.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	1.585.610.400	37	1.142.766.000	1	1.100.000.000	0	0	0,00%	0,00%	37	1.142.766.000	925,00%	72,07%	dalam proses realisasi	Inspektorat		
	6	01	01	1.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		48	200.000.000	24	83.432.000	12	45.000.000	3	10.975.000	25,00%	24,39%	27	94.407.000	56,25%	47,20%		Inspektorat		
	6	01	01	1.06	007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		48	264.000.000	24	115.053.000	12	61.000.000	3	4.259.000	25,00%	6,98%	27	119.312.000	56,25%	45,19%		Inspektorat		
	6	01	01	1.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		48	985.000.000	24	205.805.900	12	173.000.000	0	0	0,00%	0,00%	24	205.805.900	50,00%	20,89%	dalam proses realisasi	Inspektorat		
	6	01	01	1.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		48	2.511.772.000	24	1.098.122.984	12	921.523.000	3	56.620.069	25,00%	6,14%	27	1.154.743.053	56,25%	45,97%		Inspektorat		
	6	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	2.811.756.000	100	1.668.825.984	100	899.599.000	25,00%	229.985.300	25,00%	25,57%	25,00%	1.898.811.284	93,75%	67,53%		Inspektorat			

NO	KODE					KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan I Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	6	01	01	1.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48	1.622.480.000	24	377.549.984	12	345.120.000	3	49.525.300	25,00%	14,35%	27	427.075.284	56,25%	26,32%		Inspektorat
	6	01	01	1.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		48	267.899.000	60	1.291.276.000	12	554.479.000	3	180.460.000	25,00%	32,55%	63	1.471.736.000	131,25%	549,36%		Inspektorat
	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	2.365.200.000	72,36	909.862.415	100	700.000.000	16,09 %	34.876.999	16,09%	4,98%	16,09%	944.739.414	47,11%	39,94%		Inspektorat
	6	01	01	1.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		56	1.130.400.000	28	515.654.710	14	336.350.000	3	29.581.999	21,43%	8,80%	31	545.236.709	55,36%	48,23%		Inspektorat
	6	01	01	1.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		328	484.000.000	96	118.643.500	82	150.000.000	22	5.295.000	26,83%	3,53%	118	123.938.500	35,98%	25,61%		Inspektorat
	6	01	01	1.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		16	748.720.000	8	275.564.205	4	213.650.000	0	0	0,00%	0,00%	8	275.564.205	50,00%	36,80%		Inspektorat
	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti		88	31.914.610.000	78,12	7.132.733.972	86%	6.772.888.000	22,28 %	236.150.800	25,91%	3,49%	25,91%	7.368.884.772	45,00%	23,09%		Inspektorat
	6	01	02	02.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelesaian hasil temuan yang selesai ditindaklanjuti		88	28.718.330.000	78,12	6.967.571.972	86%	6.052.460.000	15,40 %	208.826.000	17,90%	3,45%	17,90%	7.176.397.972	43,13%	24,99%		Inspektorat
	6	01	02	02.01	001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		20	7.535.100.000	10	2.591.396.800	6	1.200.000.000	0	0	0,00%	0,00%	10	2.591.396.800	50,00%	34,39%	dalam proses realisasi	Inspektorat
	6	01	02	02.01	002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		24	2.921.580.000	12	1.010.339.850	6	754.000.000	1	34.350.000	16,67%	4,56%	13	1.044.689.850	54,17%	35,76%		Inspektorat
	6	01	02	02.01	003	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja		12	219.260.000	6	31.650.000	3	249.500.000	1	9.600.000	33,33%	3,85%	7	41.250.000	58,33%	18,81%		Inspektorat
	6	01	02	02.01	004	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan		12	125.900.000	6	37.050.000	3	444.050.000	1	12.600.000	33,33%	2,84%	7	49.650.000	58,33%	39,44%		Inspektorat
	6	01	02	02.01	005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		180	8.392.160.000	45	1.944.996.000	45	1.729.270.000	11	15.180.000	24,44%	0,88%	56	1.960.176.000	31,11%	23,36%		Inspektorat
	6	01	02	02.01	006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan internal yang Dibentuk		4	6.900.000.000	1	906.273.100	1	1.100.000.000	0	137.096.000	0,00%	12,46%	1	1.043.369.100	25,00%	15,12%		Inspektorat
	6	01	02	02.01	007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		8	2.626.920.000	2	445.866.222	2	575.640.000	0	0	0,00%	0,00%	2	445.866.222	25,00%	16,97%	dalam proses realisasi	Inspektorat
	6	01	02	02.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100	3.196.280.000	24,36	165.162.000	100%	594.635.000	29,17%	27.324.800	29,17%	4,60%	29,17%	192.486.800	46,88%	6,02%		Inspektorat
	6	01	02	02.02	001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		8	575.640.000	4	15.000.000	3	45.000.000	1	2.930.800	33,33%	6,51%	5	17.930.800	62,50%	3,11%		Inspektorat
	6	01	02	02.02	002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		64	2.620.640.000	16	150.162.000	16	675.428.000	4	24.394.000	25,00%	3,61%	20	174.556.000	31,25%	6,66%		Inspektorat
	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks SPII Perangkat Daerah		3,1	4.392.198.000	3,12	1.166.808.661	3,03	967.945.000	3,19	100.299.000	105,28%	10,36%	105,28%	1.267.107.661	49,27%	28,85%		Inspektorat
	6	01	03	03.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase Penyusunan Dokumen kebijakan teknis bidang Pengawasan		100	220.000.000	100	167.930.100	100	200.000.000	0,00%	7.604.000	0,00%	3,80%	0,00%	175.534.100	50,00%	79,79%		Inspektorat
	6	01	03	03.01	001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		4	371.380.000	2	121.476.800	1	100.000.000	0	7.604.000	0,00%	7,60%	2	129.080.800	50,00%	34,76%		Inspektorat
	6	01	03	03.01	002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		4	328.310.000	2	46.453.300	1	100.000.000	0	0	0,00%	0,00%	2	46.453.300	50,00%	14,15%	dalam proses realisasi	Inspektorat

NO	KODE				KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan I Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								(6)		(7)		(8)		(9)		(10=8/8)		(11=7+8)		(12=11/6)				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10=8/8)		(11=7+8)		(12=11/6)		(13)	(14)	
6	01	03	03.02		Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Pendampingan dan Asistensi perangkat daerah		100	3.692.508.000	100	998.878.561	86%	767.945.000	19,17 %	92.695.000	22,29%	12,07%	22,29%	1.091.573.561	48,54%	29,56%		Inspektorat	
	6	01	03	03.02	001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		192	1.260.088.000	96	396.820.600	48	287.800.000	0	0	0,00%	0,00%	96	396.820.600	50,00%	31,49%	dalam proses realisasi	Inspektorat
	6	01	03	03.02	002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		60	849.588.000	15	179.368.000	15	112.249.000	4	11.487.000	26,67%	10,23%	19	190.855.000	31,67%	22,46%		Inspektorat
	6	01	03	03.03	003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		16	551.716.000	8	125.500.496	4	161.983.000	1	9.928.000	25,00%	6,13%	9	135.428.496	56,25%	24,55%		Inspektorat
	6	01	03	03.02	004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		192	1.031.116.000	96	297.189.465	48	205.913.000	12	71.280.000	25,00%	34,62%	108	368.469.465	56,25%	35,74%		Inspektorat
						Total			170.294.791.208		70.943.255.689		62.538.791.049		7.041.527.926	48,37%	11,26%		77.984.783.615	56,51%	45,79%			

**3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah
Triwulan I Tahun 2024**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan pada dokumen Renja Inspektorat Provinsi Lampung 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2
Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target	Real	Target	Real
1.	Muwujudkan Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan.	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeriksaan APIP ditindaklanjuti	%	86	91,29	88	36,43
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	Level (Skor)	3 (3,05)	3,199	3 (3,08)	-

BAB IV

HAMBATAN DAN KENDALA

4.1 Hambatan dan Kendala

Melalui Evaluasi Rencana Kerja (Renja) triwulan I Tahun 2024, permasalahan yang dihadapi Inspektorat Provinsi Lampung antara lain :

1. Penyesuaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang menyesuaikan dengan Agenda Pemeriksaan Instansi lainnya
2. Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan Binwas secara Efektif dan Tematik (Pengawasan tentang Kemiskinan, Stunting, P3DN, Inflasi, Investasi, Audit Barang dan Jasa, Audit terhadap IT dan lain-lain)

4.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Memperhatikan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja program/ kegiatan / sub kegiatan data Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Inspektorat Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan, tentunya hal ini akan di pertahankan serta akan diupayakan mengeliminir faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja.
2. Agar capaian kinerja di tahun mendatang dapat lebih optimal, ke depan mekanisme pembinaan dan pengawasan akan dikembangkan agar pelaksanaannya lebih efektif dan terdokumentasi secara elektronik.

4.3 Rekomendasi Kebijakan (Rencana Tindak Lanjut)

Rekomendasi dan tindak lanjut atas capaian kinerja yang kurang dan tidak optimal, maka ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Akan dilakukan penyesuaian target kinerja dan anggaran pada sub kegiatan yang capaian realisasi kinerjanya masih jauh di bawah hasil yang diharapkan;
2. Melakukan penyesuaian personal yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan untuk mengefektifkan kinerja dan memaksimalkan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

Demikian evaluasi hasil Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Lampung 2024 disusun untuk mendapat gambaran capaian kinerja secara akuntabel. Selanjutnya evaluasi hasil Renja akan dijadikan sebagai bahan penyusunan dan kebijakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya dan bahan masukan perubahan rencana Perangkat Daerah, guna memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan yang telah ditetapkan.

Selain itu , dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Lampung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta Masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya.

Bandar Lampung, 17 Mei 2024

INSPEKTUR,

Ir. FREDY SM. MM. CGCAE
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP 19650202 199010 1 001